

**KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM ADVOKASI PEKERJA RUMAH
TANGGA DI INDONESIA (STUDI KASUS PERAN JARINGAN NASIONAL
ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA TAHUN 2004-2019)**

Aziza Amini Pradika

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183

aziza.amini.2016@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia dan juga untuk mengetahui kerjasama yang dibangun dalam gerakan advokasi pekerja rumah tangga dengan organisasi regional maupun internasional. Pekerja rumah tangga yang menjadi pekerjaan pilihan bagi lebih dari 4 juta warga negara Indonesia memiliki peran penting dalam aktivitas publik dan roda perekonomian, mulai dari keluarga hingga perekonomian negara. Dengan jasa yang mereka berikan, suatu keluarga dapat fokus bekerja untuk mendapat nilai ekonomi, yang menjadikan pekerja rumah tangga bagian dari roda perekonomian. Namun tanpa adanya Undang-Undang yang dapat melindungi mereka, pekerja rumah tangga masih dianggap rendah dan bukan pekerja formal, yang membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi didalam rumah tangga yang tertutup. Menggunakan teori *Political Opportunity Structure* dapat diketahui bagaimana dimulainya gerakan advokasi pekerja rumah tangga dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah, selanjutnya menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* dapat diketahui langkah-langkah advokasi JALA PRT bersama dengan organisasi regional dan internasional dalam menekan target advokasi.

Kata Kunci: Advokasi, Pekerja Rumah Tangga, Indonesia

Abstract

The objective of this research is to explain the role of Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) in fighting for the rights of domestic workers in Indonesia and also to find out the developed cooperation in the domestic worker advocacy movement with regional and international organizations. Domestic workers, which are the work of choice for more than 4 million Indonesian citizens, have an important role in public activities and the country's economy. With the services they provide, a family can focus on working to get economic value, which makes domestic workers part of the wheel of the economy. However, without a law that can protect them, domestic workers are still considered a low and not formal workers, which makes them vulnerable to become the victims of violence and exploitation in closed households. Using the Political Opportunity Structure theory, it can be seen how the domestic worker advocacy movement began and how it relates to the government, then using the concept of the Transnational Advocacy Network can be known JALA PRT advocacy steps together with regional and international organizations in suppressing advocacy targets.

Keywords: Advocacy, Domestic Workers, Indonesia

PENDAHULUAN

Keberadaan pekerja rumah tangga di Indonesia sangatlah penting, terbukti dengan terus meningkatnya jumlah pekerja rumah tangga sejak tahun 2015 sesuai dengan Analisa data Survei Tenaga Kerja Nasional dimana sudah mencapai 4 juta pekerja, yang setidaknya berkontribusi sebesar 76% dari tenaga kerja Indonesia (ILO, 2015). Terlepas dari hal tersebut, Indonesia hingga kini masih belum bisa melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dari eksploitasi hingga pelecehan, yang mana sebagian besar pekerja tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Hal ini terjadi karena pekerja rumah tangga belum dianggap sebagai pekerja formal oleh pemerintah sehingga tidak ada peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi mereka secara khusus sebagai pekerja rumah tangga (Bastari, 2018). Walaupun sebenarnya dalam undang-undang ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003) dalam pasal 1 butir 3 mendefinisikan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jelas berdasarkan definisi tersebut pekerja rumah tangga selayaknya diberikan perlindungan sebagai pekerja sector formal (Tim LBH Apik, 2002).

Tanpa adanya undang-undang tersebut maka pekerja rumah tangga menjadi pekerja yang sangat rentan akan kekerasan, pelecehan, eksploitasi tenaga berlebihan dan juga terisolasi dari teman dan keluarganya. Banyak sekali ditemukan pekerja anak yang bekerja hingga 14 jam setiap harinya untuk mengurus satu rumah juga menjadi korban kekerasan verbal (Tjandraningsih, 2000). Permasalah-permasalahan yang dialami oleh sebagian besar pekerja rumah tangga dikarenakan tidak adanya kontrak kerja yang mengikat antara mereka dengan tuan rumah, seperti jam kerja, hal yang harus dikerjakan, upah, jaminan kesehatan, dan lain-lainnya yang selalu diterima oleh pekerja formal, melainkan dibangun atas kekerabatan saja (Agusmidah, 2017). Hubungan ini yang membuat pekerja rumah tangga tidak bisa mengakses mekanisme-mekanisme pengadilan yang dibentuk untuk mengadili permasalahan pekerja di sektor formal (ILO, 2006).

Tidak adanya dukungan atau jaminan oleh pemerintah maupun masyarakat yang dibelenggu oleh stratifikasi sosial yang mana memposisikan kelas bawah sebagai pihak yang lemah, membuat pekerja rumah tangga terjebak di siklus yang sama tanpa henti akan kekerasan dan ketidakadilan (Muryanti, 2005). Situasi ini lah yang memulai pergerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-governmental Organization (NGO)* untuk melakukan advokasi terhadap pekerja rumah tangga. Melalui advokasi diharapkan dapat terjadinya perubahan dalam budaya pekerja rumah tangga melalui perubahan kebijakan publik, termasuk

isi dari hukum tersebut seperti uraian dari kebijakan yang tertuang; tata laksana hukum yang berhubungan dengan perangkat kelembagaan dan pelaksana dari hukum tersebut; dan budaya hukum yaitu dari bagaimana dipahami, disikapi dan direspon oleh masyarakat (Topatimasang, Fakhri, & Rahardjo, 2000).

Salah satu jaringan advokasi yang bergerak adalah JPPRT (Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) di Yogyakarta, yang mana sudah memulai advokasi pekerja rumah tangga sejak 1999 bersama dengan NGO dan persatuan pekerja rumah tangga lokal. Pergerakan JPPRT mendorong adanya kebutuhan dan pencapaian advokasi pekerja rumah tangga dari tingkat nasional, oleh LSM, organisasi perempuan, serikat pekerja rumah tangga, serikat pekerja dan lembaga-lembaga lain terkait dengan masalah pekerja domestik dikumpulkan untuk membangun jaringan nasional untuk advokasi pekerja rumah tangga, yang disebut JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), pada Juli 2004 (IDWFED, 2014).

Kini JALA PRT beranggotakan individu dan puluhan NGO seperti Serikat Pekerja Rumah Tangga SAPULIDI, Serikat PRT Tunas Mulia, Kongres Operata Yogyakarta, dan banyak serikat PRT lainnya. JALA PRT dalam upaya advokasinya memperluas jaringan dalam skala regional bersama International Labour Organisation (ILO) untuk melakukan koleksi data dan penelitian, yang mana data statistik berhubungan dengan pekerja rumah tangga resmi dari pemerintah masih susah ditemukan karena posisinya yang belum sebagai 'pekerja' (JALA PRT, 2017), selain itu juga membantu dalam memberikan dan memandu perlindungan hukum dan administrasi, advokasi untuk mencegah penyalah-perlakuan pekerja rumah tangga, mengorganisir pekerja rumah tangga melalui serikat-serikat lokal, dan peningkatan keterampilan dan teknik bekerjasama (Anggraeni, 2014).

Dan sejak tahun 2011, ketika International Labour Organization (ILO) mengadopsi konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga yang mengamatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif sebagai pekerja, yang memperluas misi advokasi kebijakan JALA PRT, tidak hanya untuk pemerintah mengesahkan RUU PPRT, tetapi juga untuk pemerintah juga meratifikasi konvensi ILO tersebut, mandat ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals/SDGs* khususnya tujuan ke delapan yaitu untuk mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja (Dhewy, 2017). Bekerja sama dengan JALA PRT merupakan bagian dari strategi ILO untuk mempromosikan konvensi ILO No. 189 dengan dukungan dan bantuan dari *United States Department of Labor (USDOL)*, khususnya dalam bidang evaluasi dan penelitian kondisi

pekerja rumah tangga. Di lingkup regional, ILO juga memiliki strategi di tingkat regional untuk meningkatkan kapasitas regional melalui pengembangan jaringan platform antara organisasi-organisasi pekerja rumah tangga di Asia dan lebih luas lagi. *International Domestic Workers Federation* (IDWF) menjadi mitra utama dalam strategi regional ini, yang mana JALA PRT sudah bergabung sebagai afiliasi. Dengan kerjasama ini banyak diselenggarakan kegiatan seperti workshop dan menyediakan forum untuk organisasi pekerja rumah tangga dan serikat pekerja untuk membahas dan berbagi pendekatan inovatif untuk mengatasi kebutuhan pekerja rumah tangga (ILO, 2018).

Perjuangan yang dilakukan oleh JALA PRT tidak hanya untuk pekerja rumah tangga dalam negeri, juga bagi pekerja rumah tangga migran. Selama proses advokasinya, JALA PRT terus meningkatkan kekuatan kapasitas organisasi dengan bantuan banyak organisasi regional dan internasional yang memiliki tujuan serupa, seperti organisasi pekerja rumah tangga internasional, organisasi perburuhan, organisasi perempuan, dan masih banyak lagi. Memperluas hubungan merupakan bagian yang penting dalam advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih mendalam mengenai proses advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga dalam mengadvokasi pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga di dengan jaringan yang dibangun bersama organisasi internasional.

KERANGKA BERFIKIR

a. Political Opportunity Structure

Menurut Tarrow, *political opportunity structure* mengacu pada gerakan yang muncul sebagai hasil dari peluang baru atau peluang yang diperluas, dimana kerentanan negara akan dirubah menjadi tindakan kolektif, sehingga membuka peluang bagi pihak lain. Proses tersebut mengarah pada tanggapan yang diberikan oleh negara dan akan menghasilkan struktur peluang baru (McAdam, McCharty, & Zald, 1996). Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap political opportunity structure, namun ada empat faktor utama yaitu: tingkat keterbukaan system politik, kestabilan dari keberpihakan kekuasaan, perpecahan diantara elit penguasa, dan ketersediaan dukungan elit. Tarrow menjelaskan apabila akses ke system politik terbuka maka orang akan memiliki lebih banyak insentif untuk bertindak. Seperti halnya orang rasional tidak akan menyerang lawan yang terbentengi dengan baik ketika peluang ditutup. Tidak masalah apabila peluang terbuka sepenuhnya atau hanya sebagian, seperti masyarakat yang mendapat akses dalam bentuk

pemilihan umum atau lembaga lain yang memungkinkan beberapa tingkat kekuatan politik (Tarrow, 1994).

Faktor ke-dua yaitu kestabilan dari keberpihakan kekuasaan, Tarrow menganggap ini lebih umum sebagai "ketidakstabilan politik", bahwa ketidakstabilan politik mendorong tindakan kolektif. Ketidakstabilan politik, dalam sistem demokrasi, ditunjukkan oleh ketidakstabilan pemilihan umum. Ketidakstabilan pemilu dapat berupa pemilihan yang terlalu ketat untuk dinilai dan pemilihan yang mengubah partai yang berkuasa. Tarrow berpendapat, "peruntungan yang berubah dari pemerintah dan partai-partai oposisi ... menciptakan ketidakpastian di antara para pendukung, mendorong para penantang untuk mencoba menggunakan kekuasaan marjinal dan dapat mendorong para elit untuk bersaing untuk mendapatkan dukungan dari luar."

Faktor ke-tiga, perpecahan antara elit yang berkuasa. Dalam konteks elit yang terpecah secara politik, suatu gerakan lebih berhasil dalam menemukan sekutu elit yang membantu gerakan bertindak di dalam dan di luar sistem politik. Dan bahkan membantu memungkinkan legislasi yang menguntungkan dengan menggunakan kelompok sekutu untuk mengambil keuntungan dari perpecahan, dengan memohon ke satu sisi untuk dukungan politik. Perpecahan elit mempengaruhi *political opportunity structure* karena memungkinkan kelompok untuk memanipulasi persaingan antara elit, serta mengambil keuntungan dari pembukaan yang dihasilkan dari pergulatan di daerah elit sistem politik dan sosial. Faktor ke-4, ketersediaan dukungan elit. Dukungan elit menawarkan peluang politik dengan meningkatkan pengaruh dan kekuatan politik kelompok dalam suatu gerakan. Yang bisa didapatkan apabila mendapat dukunga dari penguasa antara lain yaitu memegang kekuasaan untuk mengatur agenda, meningkatkan kesadaran, dan mewakili kepentingan gerakan dalam sistem politik, mereka mengubah pilihan untuk tindakan politik (Goodwin & Jasper, 2003). Penguasa yang memberi dukungan dapat mengubah *political opportunity structure* dengan bertindak sebagai penjamin atau sebagai negosiator yang dapat diterima (Morgan, 2006).

b. Transnational Advocacy Network

Menurut Keck dan Sikkink, jaringan advokasi signifikan secara transnasional dan domestik. Dimulai melalui membangun hubungan baru di antara para aktor dalam masyarakat sipil, negara, dan juga organisasi internasional, mereka melipat gandakan saluran akses ke sistem internasional. Jaringan advokasi transnasional mencakup aktor-aktor yang relevan yang bekerja secara internasional dalam suatu isu, yang memiliki nilai-

nilai bersama dan melakukan layanan dan pertukaran informasi yang tinggi. Dalam upaya untuk persuasi, sosialisasi dan menekan terhadap target advokasi, maka ada empat tipologi taktik yaitu meliputi: *information politics*, *symbolics politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Information politics, Informasi mengikat bersama aktor-aktor dalam suatu jaringan advokasi dan penting untuk efektivitas proses advokasi. NGO memperoleh pengaruh dengan berperan sebagai sumber informasi alternative, yang dilegitimasi dengan informasi teknis dan statistik. Aliran informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta tetapi juga kesaksian dari cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang menjadi bagian penting dari suatu isu. Selain itu, aktivis menafsirkan informasi tersebut dan membingkai masalah kedalam hal yang benar atau salah, karena tujuan mereka dengan cerita yang sudah dibingkai adalah untuk membujuk orang dan mendorong mereka untuk bertindak. Media adalah mitra penting dalam *information politics* dalam jaringan, untuk menjangkau target yang lebih luas, dan juga jaringan berupaya menarik perhatian pers. *Symbolic politics*, kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan, atau cerita untuk mencapai bahkan mempengaruhi target yang jauh. Setelah NGO dan aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi proses monumental untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi dari kegiatan simbolik itu yang merupakan bagian dari proses persuasi yang dapat menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi jaringan advokasi.

Leverage Politics, advokasi memiliki tujuan yaitu untuk merubah suatu kebijakan oleh aktor target seperti pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut maka jaringan advokasi perlu menekan actor yang lebih kuat, dengan mencari *leverage* atau posisi tawar di atas actor tersebut. Dengan begitu maka peran actor yang lebih kuat dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi situasi tertentu. Aktor yang lemah juga mendapatkan pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan negara. *Accountability Politics*, proses ini dilakukan untuk mempertahankan pemerintah agar tetap menjalankan kebijakan dan prinsip yang ditetapkan. NGO dan jaringan advokasi yang terus meyakinkan pemerintah atau target lainnya untuk mengubah posisi mereka, sering dianggap tidak penting. Terkadang pemerintah akan mengubah posisi mereka sesuai tuntutan hanya untuk mengalihkan jaringan advokasi dan perhatian publik. Begitu pemerintah secara terbuka berkomitmen pada suatu prinsip maka jaringan advokasi dapat menggunakan

posisi-posisi itu, untuk mengekspos jarak antara wacana dan praktik (Keck & Sikkink, 1998).

METODE PENELITIAN

Untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Penulis memilih metode ini karena permasalahan yang akan dipakai oleh penulis merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis, sehingga metode ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data primer dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Teknik yang kedua yaitu kajian pustaka, penulis menggunakan data-data yang berasal dari tulisan, laporan dari penulis yang didapatkan melalui media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, berita, dan publikasi lainnya.

HASIL PENELITIAN

JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA

Pada dasarnya, gerakan advokasi pekerja rumah tangga di Indonesia dimulai oleh perkumpulan mahasiswa di Yogyakarta pada tahun 1989, yang aktif melakukan diskusi-diskusi di Universitas (Jumiyem & Sargini, 2019), seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Jumiyem, Aktivis dan anggota JALA PRT, ditemui di Ampera Avenue pada tanggal 13 November 2019 ketika beliau sedang melakukan advokasi di Jakarta. Pada awalnya fokus diskusi masih luas seperti feminisme, hak buruh, dan hak asasi manusia (Shaidra, 2017), namun ketika terjadi salah satu kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Ngawi, yang mana memakan nyawa pekerja tersebut. Maka kasus tersebut mendorong para mahasiswa, salah satunya Lita Anggraini, yang nantinya memimpin advokasi JALA PRT, untuk memfokuskan gerakan mereka terhadap pekerja rumah tangga, yang mana kasus terus terjadi tetapi tidak ada yang peduli (Jumiyem & Sargini, 2019).

Gerakan itu semakin berkembang hingga pengorganisasian pekerja rumah tangga di Yogyakarta yang menghasilkan beberapa organisasi dan perserikatan seperti Rumpun Tjoet Njak Dien, Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia, dan Organisasi Pekerja Rumah Tangga (OPERATA) lainnya. Dengan adanya platform ini maka pekerja rumah tangga bisa

melakukan pertemuan untuk saling berbagi cerita dan pengalaman mereka dan mengajarkan hak-hak yang seharusnya mereka terima dan menghindari terjadinya kekerasan. Disadari bahwa untuk memberhentikan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga maka diperlukan landasan hukum tentang pekerja rumah tangga yang dapat mengatur hubungan kerja dan juga perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (Muryanti, Wahyuni, Kinseng, & Hubeis, 2015).

Meneruskan pergerakan Rumpun Tjoet Njak Dien, semua operata dan perserikatan pekerja rumah tangga bergabung untuk membuat jaringan yang lebih luas skala nasional tidak hanya di Yogyakarta saja, maka tahun 2004 secara resmi terbentuklah Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, lebih dikenal dengan sebutan JALA PRT. JALA PRT yang diketuai oleh Lita Anggraini, tanpa membuang kesempatan apapun, pada tahun 2004 mengajukan draft rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ke Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR) Indonesia (Jumiyem & Sargini, 2019). Dalam rancangan UU tersebut, JALA PRT menekankan bahwa pekerja rumah tangga sebagai tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, pekerja rumah tangga juga merupakan tenaga kerja yang mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dalam angka yang tinggi, jenis pekerjaan domestic juga mempunyai karakteristik yang berbeda dan diperlukan perlindungan atas pekerjaan tersebut. Undang-undang ini sangat penting karena yang diutamakan adalah keselamatan dari para pekerja rumah tangga dan juga sekaligus untuk pengakuan dari negara bahwa pekerja rumah tangga juga pekerja, sama seperti pekerja formal lainnya (Gina, 2017).

Kehadiran JALA PRT di tingkat nasional membawa perubahan yang sangat besar, yang mana sebelumnya para pekerja rumah tangga tidak tahu bila hak-hak mereka telah dilanggar dan telah menjadi korban oleh majikaannya. Saat ini sudah tercatat kasus yang dilaporkan ke JALA PRT pada tahun 2018 sejumlah 427 dan terus meningkat. Kasus-kasus seperti kekerasan fisik, seksual, *trafficking*, dan penyekapan. Seperti halnya gunung es, semakin lama semakin terlihat seberapa banyaknya hal-hal buruk yang ternyata bisa terjadi kepada pekerja rumah tangga. Selain itu juga, dengan adanya JALA PRT, semakin memperluas gerakan advokasi pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, sudah berdirinya Sekolah PRT diberbagai daerah dan perserikatan di Jabodetabek, Semarang, Lampung, Makassar dan Sulawesi Selatan (Jumiyem & Sargini, 2019).

Pencapaian besar juga dibuat oleh *International Labour Organization (ILO)* yaitu pada tanggal 16 Juni 2011, delegasi *International Labor Conference (ILC)* dari ILO memberikan suara bulat untuk mengadopsi Konvensi 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga, menjadi pengakuan internasional bahwa pekerja rumah tangga juga pekerja formal (Fish, 2015). Untuk JALA PRT, kondisi ini merubah segalanya, tidak hanya mendorong pemerintah Indonesia untuk mensahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, tetapi juga mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189, agar bisa menjadi dasar hukum untuk perlindungan pekerja rumah tangga (Kompas, 2011). Dalam proses ini, khususnya advokasi kebijakan, maka diperlukan peran besar dari sisi pemerintah Indonesia.

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dengan Pemerintah Indonesia

Sebagai negara penganut sistem demokrasi tentu di Indonesia kedudukan rakyat sangat krusial, karena rakyat yang memegang kedaulatan kepentingan dan karena sistem demokrasi dan hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan, berarti negara harus melindungi hak asasi manusia yang sudah diatur didalam konstitusi. Juga di negara penganut demokrasi, negara dikatakan milik rakyat karena negara tersebut berdiri atas perjanjian masyarakat yang mana masyarakat dapat menuarkan pendapat secara terbuka (Abdullah, 2002). JALA PRT selalu aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah mengenai perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga, melalui demo yang mereka lakukan secara rutin setiap tahunnya, contoh beberapa demonya yaitu pada tahun 2011 Aksi Damai di depan gedung DPR RI (SP, 2011), Tahun 2014 bergabung bersama Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRTBM) juga dilakukan di depan Gedung DPR RI (Gabrillin, 2014), tahun 2016 juga melakukan aksi terhadap parlemen Indonesia untuk menuntut lebih dari 103 kasus pekerja rumah tangga yang tak terselesaikan dan juga aksi yang dilakukan didepan Kompleks Parlemen, dan salah satu aksi besar yang dilakukan pada tahun 2018 yaitu didepan Kemenaker melakukan aksi cuci baju (Wildansyah, 2018).

Selain melakukan aksi-aksi demonstrasi, JALA PRT juga menyampaikan tuntutan mereka melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, dimana melakukan audiensi dalam rapat itu guna memberikan masukan dan aspirasi secara langsung maupun tertulis antara perwakilan pekerja rumah tangga dengan anggota fraksi DPR RI (DPR RI, 2016). Pendekatan ini sering dilakukan oleh JALA PRT, bertemu dengan berbagai fraksi dalam DPR untuk melobi bahkan juga disebut ‘mengemis-ngemis’ untuk dukungan mereka pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Setiap fraksi di setiap

periode pemerintahan selalu memiliki respon yang berbeda-beda, kadang mendukung tetapi juga terkadang tidak memberi respon (Jumiyem & Sargini, 2019).

Hal yang terpenting adalah dalam audensi-audensi tersebut, harus mencari dukungan anggota partai atau fraksi Komisi IX untuk mendukung disahkannya RUU PPRT, atau bahkan untuk memasukkannya kedalam Prolegnas. Karena persetujuan dari semua fraksi itu adalah hal yang penting, contohnya memasuki tahun 2014-2015, RUU PPRT dikeluarkan dari prioritas Komisi IX, karena ada satu fraksi yang tidak menyetujui, yaitu Golkar. JALA PRT difokan bahwa tidak persetujuan itu diakibatkan karena permasalahan UMR yang masih memberatkan bagi majikan, termasuk juga anggota fraksi tersebut sebagai majikan yang mungkin memiliki lebih dari satu pekerja rumah tangga (Jumiyem & Sargini, 2019). Untuk merespon tuntutan yang diberikan oleh JALA PRT untuk perlindungan pekerja rumah tangga, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Isi dari Permenaker tersebut mengacu kepada hak-hak normative pekerja rumah tangga sekaligus menghormati budaya yang berlaku di masyarakat, karena ada pekerja rumah tangga yang bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga ada yang dalam bentuk pengabdian. Didalam nya juga dibahas mengenai sanksi untuk Lembaga Penyalur Rumah Tangga yang melakukan pelanggaran (Hidayati, 2015).

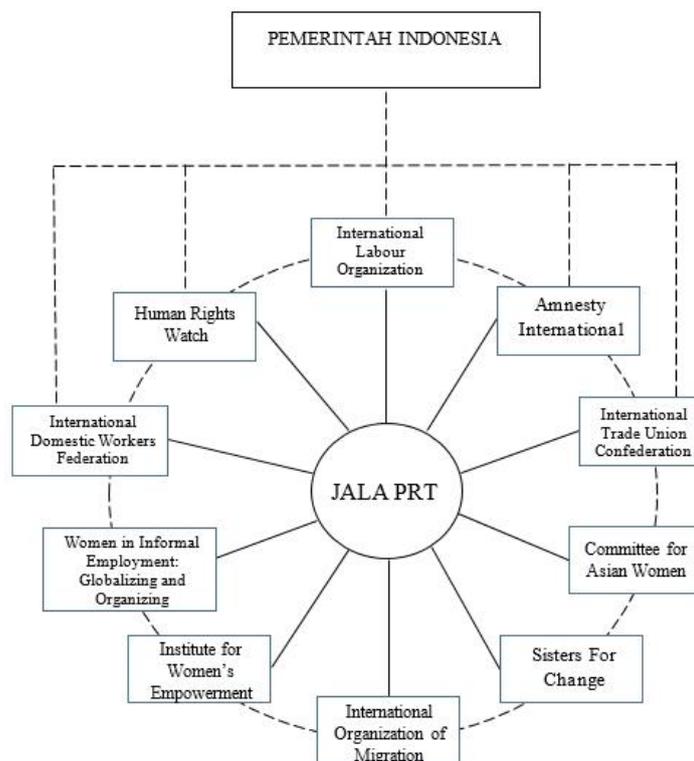
Faktor penting lainnya dalam pergerakan adalah dukungan dari aktor elit yang memiliki kuasa. Dengan dukungan itu akan meningkatkan pengaruh dan kekuatan politik organisasi dalam suatu pergerakan (Goodwin & Jasper, 2003). Selama JALA PRT melakukan advokasinya, ada aktor elit yang selalu memberi dukungan, yaitu Obon Tabroni dan Rieke Diah Pitaloka (Jumiyem & Sargini, 2019). Obon Tabroni yang lebih akrab dipanggil Bung Obon merupakan seorang aktivis buruh yang sedang mengupayakan gerakan 'Buruh Go Politics' untuk memperluas area perjuangan buruh, maka dari itu Bung Obon mengikuti kompetisi politik. Bung Obon dilantik menjadi anggota DPR RI pada Oktober 2019 (KPonline, 2019). Begitu juga Rieke adalah seorang figure televisi Indonesia dan juga seorang politisi, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan juga anggota Komisi IX DPR RI. Bahkan Rieke menunjukkan dukungannya dengan ikut turun dalam aksi damai yang dilakukan oleh JALA PRT bersama ratusan perempuan lainnya didepan gedung DPR untuk menuntut jaminan kerja pada tahun 2011 (SP, 2011). Dan Rieke terpilih menjadi Ketua Panitia Kerja Prolegnas 2020, yang berarti JALA PRT mendapat dukungan dari pihak yang memiliki kekuasaan mengatur agenda. Tetapi bahkan posisi yang dimiliki Rieke juga belum bisa menjamin seluruhnya pengesahan RUU PPRT, apabila ada fraksi atau parta politik yang tidak menyetujui.

KERJASAMA INTERNASIONAL JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA

Indonesia masih sangat jauh kemajuannya dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki hukum nasional pekerja rumah tangga dan sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 189, tetapi hal ini tidak membuat JALA PRT berhenti untuk memberi perlindungan bagi para pekerja rumah tangga melalui advokasi yang mereka lakukan. Untuk memberikan perlindungan tersebut JALA PRT tidak melakukannya sendiri, dalam prosesnya banyak mendapat bantuan dan melakukan kerja sama dengan Organisasi Internasional.

Bagan 1.

Skema Kerjasama Internasional JALA PRT dengan Organisasi Regional dan Internasional



International Labour Organization merupakan salah satu organisasi internasional yang aktif dalam membantu JALA PRT dalam melakukan advokasinya, khususnya dalam memberhentikan pengerjaan pekerja rumah tangga anak dan juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas organisasi atau serikat pekerja rumah tangga, agar semakin banyak yang ikut serta dalam mempromosikan Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga dengan efektif, terlebih lagi di Indonesia yang menjadi rumah bagi jutaan pekerja rumah tangga. Proyek ini disebut dengan istilah “PROMOTE” yang didanai oleh *United States Department of Labor*, dimana bekerja sama dengan organisasi pekerja seperti JALA PRT dan juga organisasi regional seperti *International Domestic Workers Federation (IDWF)* dimulai sejak tahun 2013 (ILO, 2015).

JALA PRT dalam program ini untuk secara efektif melakukan advokasi perlindungan dan pemberdayaan pekerja rumah tangga, harus memperbaiki kondisi kerja mereka, seperti memberdayakan pekerja rumah tangga, melaporkan apabila ada tindakan eksploitasi dan kekerasan, mengarahkan pekerja anak kepada layanan-layanan yang tepat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pekerja rumah tangga, serta dibutuhkannya komitmen pemerintah Indonesia untuk ikut andil dalam upaya ini khususnya dalam perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (ILO, 2015).

Di tingkat regional, ILO bersama IDWN akan focus terhadap berbagai pengetahuan dan bersama *International Trade Union Confederation Asia Pacific Regional Organization* (ITUC) akan mengupayakan mobilisasi perserikatan pekerja untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga. Bersama IDWN, mitra organisasi pekerja rumah tangga di Indonesia termasuk JALA PRT akan mengikuti rangkaian kerja dimana dapat mempelajari pengalaman dari praktik terbaik di kawasan Asia. ILO juga mengupayakan peningkatan kapasitas regional dengan penyusunan manual pelatihan, penyusunan laporan, dan perluasan aliansi regional melalui pertemuan antara pihak yang peduli tentang pekerja rumah tangga.

Salah satu contoh dari praktik program ini adalah pada tahun 2014, ILO mengadakan TU Regional Workshop bersama IDWF dan aktivis pekerja anak Nelien Haspels, di Yogyakarta untuk membahas mengenai Konvensi ILO No. 189 serta material edukasi dan pelatihan. Workshop itu dihadiri berbagai organisasi pekerja rumah tangga termasuk JALA PRT (IDWF, 2014). ILO juga menyediakan forum diskusi interaktif yang mempertemukan JALA PRT dengan pemerintah Indonesia yang menjadi anggota Komisi IX, di Jakarta pada tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai Konvensi ILO No. 189 dan yang paling penting bagaimana respon pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang tidak ada kemajuannya (ILO, 2016).

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Jumiye dan Ibu Sargini, mengatakan bahwa IDWF, diluar program bersama dengan ILO, merupakan mitra dekat JALA PRT sejak tahun 2007 (Jumiye & Sargini, 2019). IDWF adalah organisasi global yang focus terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga berbasis nilai keanggotaan dan demokratis. (Conley, 2016). IDWF pada hakikatnya merupakan federasi dari kelanjutan kerja *International Domestic and Household Workers Network* (IDWN), yang dibentuk pada tahun 2009 di Jenewa pada *International Labour Conference* oleh pemimpin organisasi pekerja rumah tangga dari seluruh dunia, salah

satunya yaitu JALA PRT juga ikut meresmikan. IDWN pada tahun 2012, bersama dengan *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing* (WIEGO) mendukung JALA PRT dalam membentuk Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (KAPPRT) bersama tiga perserikatan pekerja rumah tangga lain yang memiliki tujuan untuk ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan disahkannya hukum nasional pekerja rumah tangga (Dave, 2016).

Contoh beberapa workshop IDWF yang dihadiri oleh JALA PRT adalah pada tahun 2014 di Bangkok, bersama dengan UN WOMEN bertemakan *Regional Meeting on Strengthening Regional Networking of Domestic Workers Organization*, dalam pertemuan tersebut setiap organisasi pekerja rumah tangga berbagi cerita dan menilai pengalaman maupun partisipasi mereka dalam aktivitas regional dan internasional (IDWF, 2014). Pada tahun 2016, IDWF bekerja sama langsung dengan JALA PRT di Jakarta, mengadakan workshop selama 2 hari untuk membahas bagaimana pengaturan sebuah proyek dan advokasi untuk kerja layak bagi pekerja rumah tangga (IDWF, 2016). Selain melakukan workshop bersama, IDWF juga beberapa kali mendonorkan modal untuk program JALA PRT, walaupun tetap saja sumber utama kita dari iuran anggota JALA PRT (Jumiyem & Sargini, 2019).

Salah satu organisasi regional pertama yang JALA PRT kenal adalah *Committee for Asian Women* (CAW) (Jumiyem & Sargini, 2019). CAW bergabung dengan JALA PRT bersama Perserikatan Tunas Mulia dan organisasi pekerja rumah tangga yang lain di Indonesia dalam mengenang korban kekerasan saat bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang bernama Sunarsih, meninggal karena diperlakukan dengan kejam oleh majikannya. Pada tahun 2011, CAW juga bersama dengan IDWN menyerukan langsung kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung adopsi Konvensi ILO No. 189 pada saat menghadiri *International Labor Conference* di Jenewa (Jayaseelan, 2011). *Institute for Women's Empowerment* (IWE) juga menjadi mitra JALA PRT dalam melaksanakan programnya, IWE dan JALA PRT bersama menyelenggarakan Jambore Nasional Pemimpin Perempuan pada tahun 2015, peserta yang terlibat dalam acara itu merupakan pemimpin perempuan dari berbagai provinsi Indonesia, seperti Palembang, Sumatera Utara, Aceh, Jawa barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Madura dan Yogyakarta. Tidak hanya dari organisasi pekerja rumah tangga, juga mewakili kelompok tani dan buruh gendong. Sesuai dengan tujuan IWE, acara itu diadakan untuk menciptakan pemimpin perempuan yang melawan diskriminasi terhadap gender yang telah menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dalam beragam konteks situasi (KPA, 2015).

Pada tahun 2016, JALA PRT ikut serta dalam kampanye IOM X yang diadakan oleh *International Organization of Migration (IOM)* bersama dengan *U.S. Agency for International Development (USAID)* yang diadakan di Jakarta. Dalam kampanye tersebut IOM menayangkan perdana *Open Doors: An IOM X Production*, video drama berisi tiga bagian berdurasi 22 menit yang memiliki pesan moral tentang pencegahan eksploitasi pekerja rumah tangga khususnya di kawasan ASEAN. Kontribusi JALA PRT ada pada penayangan perdana *Sebuah Harapan: An IOM X PSA*, video drama itu berdurasi 3 menit yang menceritakan bagaimana cara membangun hubungan antara majikan dengan pekerja rumah tangga yang dapat menciptakan rumah dengan lingkungan yang bahagia, melalui komunikasi terbuka dan adanya hormat antara kedua pihak. Dalam video itu menampilkan Lita Aggraini, ketua JALA PRT, dan Dede Yusuf yang pada saat itu menjabat sebagai ketua komisi IX DPR RI (UN WOMEN, 2016).

Dari tahun 2016 sampai 2018, JALA PRT bekerja sama dengan *Sisters For Change (SFC)* dalam suatu program yang bertujuan menguatkan struktur pendukung untuk pekerja rumah tangga khususnya untuk meningkatkan akses ke pengadilan dan juga hasil pengadilan untuk pekerja yang menjadi korban penganiayaan, dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas JALA PRT dalam legal atau hukum, advokasi dan kepemimpinan (SFC, 2019). Pada Oktober 2018, JALA PRT dan SFC menerbitkan laporan bersama yang mana didalamnya membuktikan temuan-temuan tentang tingkat kekerasan yang tinggi dialami oleh pekerja rumah tangga di dalam rumah tempat mereka bekerja (SFC, JALA PRT, 2018).

LANGKAH-LANGKAH ADVOKASI JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA

Information Politics

Informasi memiliki fungsi yang penting dalam proses advokasi, khususnya bagi JALA PRT yang untuk mendapatkan informasi resmi mengenai pekerja rumah tangga sangatlah susah karena mempertimbangkan posisi mereka yang masih dianggap sebagai pekerja informal. Keadaan berubah ketika JALA PRT bergabung dalam proyek PROMOTE yang dilakukan oleh ILO dimana salah satu programnya adalah untuk bekerja sama dengan tim Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan tim Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bersama mereka mengembangkan metodologi yang dapat memperkirakan jumlah pekerja rumah tangga dan juga pekerja anak menggunakan data-data yang ada (ILO, 2015). Maka dari itu, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya mendapat angka pasti jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia yaitu 4,2 juta (ILO, 2015).

Kerja sama yang dilakukan guna mendapat informasi juga dilakukan melalui studi banding bersama UNITED dan LEARN di Jakarta pada November 2019, mengenai kepesertaan pekerja rumah tangga dalam Jaminan Ketenagakerjaan. Sistem jaminan di Indonesia masih banyak yang bisa dikembangkan dan hal ini dipelajari melalui pengalaman UNITED dan LEARN di Filipina, kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang tepat untuk dijadikan panutan, karena kesejahteraan pekerja rumah tangga sangat baik, bahkan Filipina merupakan negara kedua yang meratifikasi Konvensi ILO No. 189, yang pertama adalah Uruguay. Lalu dilanjutkan pada tahun 2013, Filipina meloloskan hukum nasional pekerja rumah tangga yang mereka sebut Batas Kasambahay (Albano, 2019).

Dalam tahap *Information Politics*, selain antar-organisasi bisa menjadi sumber informasi alternatif, aliran informasi pun dalam jaringan juga penting. Hal ini merupakan keseharian JALA PRT, karena mereka menjadi tempat dimana pekerja rumah tangga menceritakan keluh kesah mereka mengenai perlakuan yang mereka dapatkan di tempat kerja. Metode yang digunakan oleh JALA PRT adalah singkat, padat dan menggunakan foto untuk visualisasi (Jumiyem & Sargini, 2019). Pada tahun 2017, JALA PRT bersama dengan ILO dan AJI Jakarta menerbitkan buku yang berjudul “Kami Tidak Akan Diam”, didalamnya merupakan kompilasi 31 cerita pekerja rumah tangga tentang kehidupan pribadi mereka, kehidupan kerja mereka, dan juga perjuangan yang mereka lakukan di perserikatan pekerja rumah tangga (JALA PRT, 2017).

JALA PRT ikut aktif membagikan informasi dan kisah mengenai pekerja rumah tangga seperti melalui akun *facebook* dan *twitter*, memposting foto-foto, meme, poster di halaman akun tersebut, setiap perserikatan juga memiliki akun masing-masing. JALA PRT turut mendata seberapa banyak aktivitas sosial media perserikatan setiap minggunya guna untuk mengawasi perkembangan gerakan advokasi pekerja rumah tangga melalui sosial media (JALA PRT, 2017). Sejak tahun 2018, JALA PRT memiliki blog resmi mereka yang disebut Tungku Menyala dengan slogan “Sekali Berkabar, Terus Berkobar” yang selain untuk menyebarkan informasi dan cerita, juga sebagai alat kampanye JALA PRT (Tungku Menyala, 2018). JALA PRT juga merangkum cerita-cerita atau isu yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga kedalam penampilan drama.

Melalui pementasan-pementasan drama, akan diundang pemerintah dan masyarakat agar dapat melakukan dialog bersama setelah pementasan mengenai perlakuan kekerasan

terhadap pekerja rumah tangga (Jumiyem & Sargini, 2019). Dalam *Information politics*, media memiliki peran yang penting untuk menjangkau target dengan lebih luas. Tetapi kadang campur tangan media massa yang berlebihan bisa membawa dampak yang tidak baik, contohnya ketika JALA PRT memberi tuntutan melalui Draft RUU PPRT, media lah yang membesarkan bagian bahwa pekerja rumah tangga meminta diberi gaji sesuai dengan UMR, dan sekarang hal itu sangat memberatkan bagi pembuat kebijakan (Jumiyem & Sargini, 2019).

ILO ditahap ini mempublikasikan berbagai bentuk tulisan mengenai kondisi pekerja rumah tangga di Indonesia, salah satu contohnya yaitu Report yang berjudul “*Flowers on the Rock*” dalam bahasa berarti Bunga-bunga diatas Padas. Dalam laporan itu digambarkan bagaimana realita pekerja rumah tangga yang tereksplorasi, khususnya para pekerja anak, sebagai anak saja haknya tak terpenuhi (Putranto, Utami, & Usman, 2004). Di tahun 2006, ILO mempublikasikan “Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia” sebagai proyek ILO Menggalang Aksi untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Perdagangan di Asia Tenggara (ILO, 2006). Dan juga untuk menyimpulkan hasil kerjasama ILO dengan JALA PRT dan juga perserikatan lainnya dalam proyek PROMOTE, ILO mempublikasikan buku yang berjudul “*Ten Emerging Good Practices from Indonesia*” (ILO, 2018).

Symbolic Politics

Untuk JALA PRT, salah satu momen yang akan selalu tercatat dalam sejarah adalah kasus kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga berumur 15 tahun bernama Sunarsih. Penganiayaan terhadap Sunarsih dilakukan oleh majikannya di Surabaya, dimana Sunarsih diperlakukan sangat tidak manusiawi, bekerja 18 jam setiap harinya tanpa istirahat dan hari libur. Sunarsih juga menjadi korban penyekapan, karena tidak boleh melakukan komunikasi apapun dan hanya boleh keluar dibatasi di depan teras rumah. Upah pun tidak dibayar dengan alasan kenaikan listrik dan air akibat dari kesalahan yang dituduhkan kepada Sunarsih. Makan hanya diberi makanan basi sehari sekali tidur di lantai jemuran. Di akhir hidupnya, Sunarsih meninggal dengan badan penuh luka memar dan kondisi tangan terikat, penyiksaan ini dilakukan karena majikan menuduh Sunarsih mengambil makanan (Belarminus, 2016).

Bahkan setelah kasus ini dibawa ke jalur hukum, majikan terlepas dari hukuman dan kembali melakukan kekerasan terhadap pekerja rumah tangganya. Hal ini sudah membuktikan negara “mengorbankan” pekerja rumah tangga. Untuk mengenang kisah Sunarsih, pada tahun 2007, JALA PRT bersama dengan Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) Yogyakarta meluncurkan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional yaitu 15 Februari, yaitu tanggal terungkapnya kasus Sunarsih, aksi ini juga didukung dan didampingi oleh *Committee for Asian Women (CAW)*. Dilakukan pertama kali di Yogyakarta dan di Surabaya, JPPRT melakukan aksinya di Titik Nol depan Kantor Pos Yogyakarta, dilakukan aksi teatral memasak, mencuci dan membersihkan (Tungku Menyala, 2018).

Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional yang merupakan bagian dari *symbolic politics* JALA PRT, juga melahirkan momen simbolis lainnya. Untuk merayakan hari besar tersebut di tahun 2010, JALA PRT mengadakan acara yang mereka sebut “Seber Cinta untuk Pekerja Rumah Tangga” di Taman Tugu Proklamasi Jakarta. Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kampanye untuk membangun penghargaan dan peningkatan solidaritas terhadap pekerja rumah tangga Indonesia. Maksud dari kata serbet itu adalah, dalam acara tersebut dikumpulkan 1.200 serbet, baik baru maupun bekas, yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia, kemudian serbet-serbet yang terkumpul dijahit bersama-sama oleh semua pekerja rumah tangga yang hadir hari itu menjadi satu serbet raksasa. Diatasnya dituliskan pesan yang diserukan kepada DPR RI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa UU PPRT itu penting dan harus di prioritaskan. Serbet raksasa ini dibuat untuk menjadi simbol gerakan advokasi pekerja rumah tangga dalam mendorong pemerintah mewujudkan UU PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO No. 189, gerakan ini bahkan didukung oleh ILO yang diwakili kehadirannya oleh Peter Van Ruth dalam acara tersebut, dan dihadiri juga oleh Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Perlindungan Perempuan (Edj, 2010).

Selain Serbet Raksasa, Aksi mogok makan juga merupakan salah satu aksi simbolik yang sering dilakukan oleh JALA PRT. Di akhir tahun 2014, JALA PRT melakukan aksi mogok makan di depan gedung DPR yang berlangsung selama 4 hari untuk menunjukkan rasa kecewa mereka terhadap DPR RI 2009-2014 yang saat itu belum menyelesaikan pembahasan RUU PPRT (Putri, 2014). Mereka menyebut aksi itu “Tidak Akan Diam” untuk mendesak DPR RI memasukkan RUU PPRT kedalam Prolegnas Prioritas 2015-2019 dan juga disahkan pada periode tersebut. Untuk mendukung aksi JALA PRT, organisasi perempuan dan masyarakat melakukan berbagai rangkaian seperti orasi budaya dan politik, pemutaran film, pameran foto,

monolog, pertunjukkan music, dan lainnya (Hukum Online, 2014). Aksi mogok makan dilakukan tidak hanya sekali dalam advokasi JALA PRT, tetapi menjadi aksi pilihan untuk kedepannya.

Kelahiran Konvensi ILO No. 189 Tentang Kerja Layak juga menjadi *symbolic politics* tersendiri bagi JALA PRT. Sebagai Konvensi internasional pertama yang menetapkan hak-hak pekerja rumah tangga, berarti Konvensi ini telah menyediakan standar internasional dan mensyaratkan negara-negara untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga. Maka dari itu untuk merayakan pencapaian yang besar ini, kelahiran Konvensi tersebut dijadikan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, yaitu jatuh pada tanggal 16 Juni. Di setiap tahun pada tanggal 16 Juni semua organisasi pekerja rumah tangga dan hak asasi manusia akan menggabungkan upaya mereka untuk membuat tuntutan atau perjanjian akan peratifikasian Konvensi ILO No. 189 di negara mereka (Begum, 2016). Untuk merayakan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional maupun Nasional, JALA PRT akan melakukan rangkaian acara, seperti mempublikasikan hasil-hasil repot yang sudah dilakukan, contohnya ILO bersama dengan JALA PRT pada tahun Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional 2017 merilis “Kompilasi penanganan Kasus-Kasus PRT dan PRTA Indonesia” (JALA PRT, 2017). Dan melakukan pertemuan-pertemuan atau talkshow untuk membahas kondisi pekerja rumah tangga Indonesia, dan tentu saja menggunakan momen ini untuk menekan pemerintah Indonesia (Jumiyem & Sargini, 2019).

Leverage Politics

JALA PRT dalam melakukan advokasi pekerja rumah tangga di Indonesia bekerja sama dengan banyak organisasi internasional, namun tidak semua dari aktor tersebut memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia. Dan berhubungan dengan “pekerja” tentu saja ILO memiliki pengaruh disini sebagai agensi special PBB pertama sejak 1946 yang bisa menyatukan antara pemerintah Negara, pengusaha atau pemberi kerja, dan pekerja untuk membentuk standar tenaga kerja (ILO, 2019). Bertepatan ditahun 2019, ILO merayakan 100 tahun berdirinya organisasi sejak didirikan pertama kali pada tahun 1919, sampai saat ini ILO sudah mengadopsi 190 Konvensi dan 206 Rekomendasi yang berhasil meningkatkan kehidupan kerja jutaan orang. Untuk merayakan ke-100 tahunnya, ILO memulai program *Centenary Ratification Campaign* dimulai diawal tahun 2019. Dalam program itu, ILO menyerukan kepada pemerintah Negara Anggota yang berjumlah 187 Negara untuk setidaknya meratifikasi satu Konvensi atau Protokol ILO tambahan di tahun 2019, karena

masih masalah dan tantangan dalam dunia kerja baru yang diciptakan oleh aktivitas globalisasi dan kegiatan lintas batas negara, kini standar internasional untuk perburuhan diperlukan bahkan lebih dari sebelumnya (ILO, 2019).

Indonesia tidak menggunakan kesempatan dalam program kampanye ratifikasi ILO ini untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 ataupun konvensi lainnya. Walaupun begitu di tahun 2019 ini, Indonesia memberikan kontribusi dalam perkembangan standar kerja internasional dengan mendukung pengesahan Konvensi dan Rekomendasi ILO tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Instrumen ILO ini disahkan melalui pemungutan suara oleh Negara Anggota pada *International Labour Conference* (ILC) yang ke-108 di Jenewa, Juni 2019 (Budi, 2019).

Setelah Konvensi ILO No. 189 diadopsi pada tahun 2011, *The International Trade Union Confederation* (ITUC) meluncurkan kampanye “12 x 12”, untuk menargetkan 12 negara meratifikasi Konvensi ILO No. 189 diakhir tahun 2012, dan Indonesia menjadi salah satunya (ITUC, 2012). ITUC bekerja sama dengan JALA PRT dan serikat kerja lainnya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar meratifikasi Konvensi ILO No. 189. ITUC Asia – Pacific di Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional Indonesia turut mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia pada saat itu yaitu, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan mengesahkan RUU PPRT (ITUC, 2012).

Human Rights Watch (HRW) juga merupakan organisasi internasional yang mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. HRW mempublikasikan salah satu laporan pertama yang pernah dibuat oleh organisasi internasional mengenai pekerja rumah tangga di Indonesia, bersama dengan ILO, ILO-IPEC, UNICEF, dan organisasi lainnya pada tahun 2005 merilis “Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia”. Dalam laporan tersebut dibahas mengenai penyalahgunaan pekerja dibawah umur dirumah tangga orang lain tanpa pengawasan apapun dan juga HRW memperjelas kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja rumah tangga, maka dari itu HRW mendesak Indonesia untuk secara ketat membatasi usia minimum 15 tahun untuk bekerja disektor apapun termasuk pekerja rumah tangga. Bahkan HRW juga menuliskan rekomendasi yang detail untuk setiap bagian pemerintahan, seperti Pemerintah Daerah, DPR RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM, dan terus berlanjut (MuhammedAlly, 2005). HRW kembali mempublikasikan isu yang sama pada tahun 2009 dengan tuntutan yang sama,

kemudian di tahun 2010, bersama dengan JALA PRT dan Migrant Care sebagai antisipasi terhadap Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, HRW mendesak pemerintah Indonesia untuk mengadopsi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga untuk mengatasi pola eksploitasi dan pelecehan yang lama (HRW, 2010). HRW juga mengirimkan surat langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan beberapa isu HAM dimasa pemerintahannya, dan Perlindungan pekerja rumah tangga menjadi salah satunya (HRW, 2014).

Amnesty International, juga menjadi salah satu pendukung JALA PRT dalam mendorong pemerintah. Sejak tahun 2010, ketika Sekretaris Umum Amnesty International Salil Shetty melakukan kunjungan ke Indonesia, ia mengungkapkan rasa perhatiannya kepada perlunya perlindungan pekerja rumah tangga dalam pertemuannya bersama Menteri-Menteri pemerintah RI (IDDAILY, 2011). Amnesty International kemudian mengeluarkan pernyataan public pada Februari 2014 yang berjudul “Indonesia: Pekerja rumah tangga yang tereksplorasi memerlukan perlindungan hukum secepatnya”. Diakhir Pernyataannya, Amnesty International menyerukan kepada DPR RI untuk secepatnya mengesahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan juga menyebutkan bahwa mereka berdiri bersama dalam solidaritas JALA PRT, yang sudah bertahun-tahun mengkampanyekan pekerja rumah tangga (Amnesty International, 2014). Amnesty International kembali menunjukkan kekecewaannya kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2015 dan 2016 untuk menekan segera memberi payung hukum bagi pekerja rumah tangga (Amnesty International, 2016). Dan di tahun 2019, Amnesty International mempublikasikan dokumen yang isinya merupakan sembilan isu utama hak asasi manusia yang harus diprioritaskan oleh kandidat presiden dan anggota legislative yang akan terpilih di pemilihan umum mendatang, yang mana tentu perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia termasuk didalamnya (Jurnal Perempuan, 2019).

Accountability Politics

Idealnya, tahap ini adalah tahap dimana proses advokasi sudah berakhir atau tujuan dari sebuah pergerakan sudah tercapai, yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan atau hasil akhir tersebut tetap berjalan dan diterapkan oleh target advokasi (Soetjipto, 2018). Tetapi dalam tahap ini berbeda untuk JALA PRT dalam upayanya mengadvokasikan hak-hak pekerja rumah tangga, karena Negara belum memenuhi tuntutan mereka. JALA PRT memastikan bahwa ada transparansi dalam pergerakan antara pemerintah Negara dan JALA PRT, dan tidak berhenti untuk terus menghubungi dan menemui pembuat kebijakan.

Pemerintah pun berkali-kali memberikan pernyataan mengenai kepentingan RUU PPRT, yang bisa terus dituntut untuk wacana itu segera dipraktikan (Jumiyem & Sargini, 2019).

Salah satu pernyataan penting mengenai perundang-undangan pekerja rumah tangga adalah ucapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika beliau menghadiri *International Labour Confention* (ILC) sesi ke-100 di Jenewa, Juni 2011. Momen ini besar karena di Konferensi itulah Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga diadopsi oleh ILO, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato dalam *High Level Plenary* mengatakan bahwa Konvensi ini akan membantu negara-negara di dunia untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga secara hukum, administrative dan institusional (LBH, 2015). Dalam pidatonya, Presiden membahas beberapa kemajuan Indonesia dalam menangani pekerja rumah tangga migran, dan mendorong bagi setiap negara untuk memberi perlindungan kepada pekerja rumah tangganya, dan melalui Konvensi ILO No. 189 akan membantu Indonesia untuk merumuskan undang-undang nasional yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut (ILO, 2011).

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi harapan besar bagi seluruh pekerja rumah tangga di Indonesia, tetapi pernyataan itu memang hanya sebatas ucapan karena tidak paraktik yang dihasilkan dari wacana tersebut. Didukung oleh *International Domestic Workers Network* (IDWN) dalam kampanye 12x12 yang dimulai oleh ITUC, JALA PRT menagih janji Presiden untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 bersama dengan perserikatan lainnya di akhir tahun 2011 (Saputro, 2011). Bahkan, karena dianggap gagal dalam melindungi pekerja rumah tangga, JALA PRT dengan koalisinya berjumlah 162 pekerja rumah tangga menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diajukan ke Pengadilan Negri Jakarta Pusat (KBC, 2011). Untuk membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanggung jawabkan ucapannya, Amnesty International juga dalam pernyataan public yang dibuat pada tahun 2014 mendesak Indonesia untuk segera Meratifikasi Konvensi ILO No. 189 sebelum periode kerja Presiden berakhir (Amnesty International, 2014).

Memasuki masa jabatan Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memiliki visi dan misi yang mereka sebut sebagai Nawa Cita. Dalam Nawa Cita berisi Sembilan agenda strategis untuk pembangunan Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong (Rahayu, 2014). Untuk merealisasi kan agenda ini, perlindungan pekerja rumah tangga dalam negri maupun migran harus dipenuhi. Tetapi perlindungan terhadap pekerja migran atau TKI

yang ditahun 2019 sedang diutamakan (Nugroho, 2018). Untuk Perlindungan pekerja rumah tangga dalam negeri sebaliknya belum mendapat kemajuan, bahkan Lita Anggraini sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan mengenai RUU PPRT, tetapi belum ada realisasi apapun (Jumiyem & Sargini, 2019)

Dalam masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang ada kemajuan yaitu Permenaker No. 2 Tahun 2015, walaupun tidak memiliki payung hukum yang jelas, tetapi seharusnya diimplemetasikan sebaik-baiknya. Untuk JALA PRT, Permenaker tersebut digunakan untuk mendesak majikan atau pemberi kerja memberikan jaminan ketenagakerjaan (Jumiyem & Sargini, 2019). Dan ketika hukum itu terbukti tidak menjadi payung hukum yang kuat dan kasus pekerja rumah tangga terus bertambah maka mendorong IDWF untuk menegur Pemerintah Indonesia. IDWF membantu JALA PRT melakukan pengawasan terhadap perlindungan pekerja rumah tangga dan bagaimana Pemerintah mengimplementasikan hukumnya untuk menangani kasus. Dalam teguran yang mereka rilis, mengatakan bahwa di Indonesia para pekerja rumah tangga bekerja dalam situasi perbudakan, dan pemerintah tidak melakukan pencegahan ataupun tindakan hukum terhadap perbudakan (IDWF, 2016).

Dalam *accountability politics*, tidak hanya mengawasi pemerintah untuk menepati komitmennya tetapi juga memastikan adanya keterbukaan antara Pemerintah dan pelaku advokasi. Setelah berkali-kali melakukan pertemuan melalui audensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPR RI dan fraksi-fraksinya seperti Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PAN, Demokrat dan lainnya (Jumiyem & Sargini, 2019), dapat dipahami bahwa isu krusial mengapa RUU PPRT terus ditolak adalah keberatan anggota dewan mengenai upah. Untuk mencari *win-win solution* dan menyamakan posisi tawar, maka JALA PRT untuk saat 2020-2024 tidak mengungkit masalah UMR dan memprioritas kan 4 hal dalam tuntutananya, yaitu ditetapkan libur mingguan, pemberian THR, Jaminan untuk pekerja (Sosial, ketenagakerjaan, kesehatan), dan bebas berserikat (Jumiyem & Sargini, 2019).

PENUTUPAN

JALA PRT sudah memulai advokasi pekerja rumah tangga sejak tahun 2004, dari memberi perlindungan dan bantuan bagi pekerja rumah tangga dan juga advokasi kebijakan untuk disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kemajuan besar dibuat dalam proses advokasi pekerja rumah tangga secara internasional, yaitu kelahirannya Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada Juni 2011. Setelah Konvensi ini lahir, misi JALA PRT meluas tidak hanya untuk mendorong pemerintah

mengesahkan RUU PPRT, tetapi juga untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Untuk mempromosikan Konvensi tersebut, JALA PRT bekerja sama langsung dengan *International Labour Organization* (ILO) hingga tahun 2018 dalam proyek mereka Promote dengan beberapa perserikatan local lainnya dan organisasi regional.

JALA PRT tidak hanya bekerja sama dengan ILO, tetapi dengan banyak organisasi regional maupun internasional lainnya, seperti *International Trade Union Confederation* (ITUC), *International Domestic and Household Workers Network* (IDWN), *International Domestic Workers Federation* (IDWF), *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing* (WIEGO), *Committee for Asian Women* (CAW), *Institute for Women's Empowerment* (IWE), *International Organization of Migration* (IOM), dan *Sisters For Change* (SFC). Melalui berbagai banyak kerja sama dengan organisasi regional dan internasional membantu JALA PRT dalam proses advokasi pekerja rumah tangga, khususnya peningkatan kapasitas organisasi, dari kepemimpinan dan pelatihan advokasi yang didapatkan dari berbagai workshop bersama IDWF dan juga program PROMOTE ILO, kemampuan penanganan hukum juga berkembang dari kerja sama dengan SFC guna menangani kasus-kasus pekerja rumah tangga oleh tim paralegal JALA PRT tanpa adanya hukum spesifik yang dapat melindungi mereka dan hingga tahun 2018 tercatat 427 kasus yang dilaporkan ke JALA PRT, pemahaman pekerja rumah tangga secara general juga mulai ditingkatkan melalui berbagai program yang dilakukan bersama organisasi-organisasi internasional lainnya.

Jaringan transnasional lazim terjadi dalam isu-isu yang memiliki ketidakpastian informasi, maka dari itu tujuan utama membangun hubungan adalah untuk pertukaran informasi, bagaimana aktor dalam jaringan tersebut dapat berbagi informasi yang penting dan merubahnya menjadi media untuk menekan atau mendapat posisi tawar yang lebih baik terhadap target advokasi yang lebih kuat. Untuk membantu JALA PRT dalam hal ini ada ILO dan IDWF yang selalu menjadi mitra pergerakan JALA PRT, dan juga *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, begitupun organisasi lainnya yang sudah bekerja sama sebelumnya dengan JALA PRT. Langkah pertama dalam advokasi yaitu *Information politics*, dimana JALA PRT dengan bantuan ILO dapat mengetahui informasi-informasi yang susah didapat dari pemerintah dan juga bisa berkolaborasi mempublikasikan berbagai hasil report dan kegiatan. Belajar dari UNITED dan LEARN dari Filipina mengenai pengalaman mereka dalam mengembangkan sistem jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga. Selain itu dalam tahap ini, JALA PRT menggunakan fakta yang mereka punya dan merubahnya menjadi kunci penting dalam advokasi, membingkai masalah menggunakan media sosial, pertunjukkan teater,

blog resmi, artikel internet dan juga siaran radio untuk menyebarkan cerita-cerita pekerja rumah tangga agar sampai ke masyarakat dan pembuat kebijakan.

Langkah kedua yaitu *symbolic politics*, dimana JALA PRT memiliki beberapa agenda yang momentual, seperti meresmikan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional (15 Februari) didukung oleh CAW dan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional (16 Juni) oleh ILO, aksi serbet raksasa yang didukung oleh ILO, dan aksi mogok makan yang tidak dilakukan sesekali saja. Berikutnya *leverage politics*, JALA PRT yang posisinya lebih lemah dari pemerintah Indonesia mendapat banyak bantuan dalam mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT dan ratifikasi Konvensi ILO No. 189, ILO memiliki program Promote untuk mempromosikan kedua hal tersebut dan juga melalui *Centenary Ratification Campaign* untuk mendesak Negara Anggota meratifikasi Konvensi ILO. Selain itu juga organisasi pekerja rumah tangga regional dan internasional yang ikut mendesak pemerintah Indonesia ketika melakukan kunjungan, melalui laporan, melalui pernyataan public dan surat yang ditujukan langsung ke Presiden Indonesia. Organisasi tersebut yaitu *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, *The International Trade Union Confederation*, dan *International Domestic Workers Federation*.

Langkah terakhir yaitu *accountability politics*, dimana JALA PRT akan melakukan pengawasan agar pemerintah menepati janji dan komitmen yang mereka buat, agar wacana segera dipraktikkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo keduanya membuat pernyataan bahkan janji kampanye yang menyebutkan pekerja rumah tangga. Memasuki 15 tahun semenjak RUU PPRT pertama kali diajukan oleh JALA PRT dan 8 tahun semenjak ILO mengadopsi Konvensi ILO No. 189, belum ada kemajuan yang signifikan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Berbicara mengenai advokasi kebijakan, dengan bantuan dan dampingan banyak organisasi regional dan internasional, advokasi kebijakan JALA PRT masih terjebak dalam RUU PPRT yang dikeluar-masukkan ke dalam Prolegnas DPR RI, berbeda dengan kemajuan advokasi sosial yang terus berkembang. Apabila pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi pekerja rumah tangga sebagai pekerja, pemerintah tetap harus memberikan perlindungan untuk warga negaranya, sebagai manusia yang harus dipenuhi hak asasinya, dari kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya.

Tidak tahu butuh berapa banyak pekerja rumah tangga yang harus menjadi korban kekerasan ataupun eksploitasi untuk negara menyadari pentingnya payung hukum bagi jutaan warga negaranya tersebut. Dengan Negara yang terus membiarkan permasalahan ini terjadi,

JALA PRT menilai bahwa pembuat kebijakan Indonesia mendukung perbudakan dan bertindak seperti majikan. Tetapi bagaimana pun respon pemerintah, JALA PRT akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga, dan bantuan beberapa tokoh elit pun tersedia dalam pemerintahan Indonesia, yaitu anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan juga Bung Obon yang tetap mewakili pergerakan buruh sebagai anggota DPR RI. RUU PPRT akan terwujudkan apabila ada *politic will* yang kuat antara pemerintah dan juga DPR RI, tidak bisa hanya satu dari mereka. Dan diharapkan setelah dimasukkannya RUU PPRT kedalam Prolegnas prioritas 2020, DPR RI Komisi IX dapat segera membahas rancangan tersebut dan melanjutkan dengan Mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2002). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agusmidah. (2017). Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Samudra Keadila Vol 12, No. 1*, 18-25.
- Albano, J. A. (2019). FGD Pemetaan Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rumah Tangga [Recorded by J. A. Albano]. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Amnesty International. (2014, Februari 13). *Indonesia: Pekerja rumah tangga yang tereksplorasi memerlukan perlindungan (Bahasa Indonesia)*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210332014INDONESIAN.pdf>
- Amnesty International. (2016, Juni 15). *Indonesia: Pekerja Rumah Tangga terus diabaikan atas*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2142662016INDONESIAN.pdf>
- Anggraeni, L. (2014, Desember). Wawancara dengan Ketua JALA PRT. (Muryanti, Wahyuni, Kinseng, & Hubeis, Interviewers)
- Bastari, G. R. (2018). Domestic Worker, Transnational Advocacy and the State of Exception: A Case Study on The Advocacy of Domestic Worker's Rights in Indonesia . *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 3, No. 1*, 37-54.
- Begum, R. (2016, Juni 16). *On International Domestic Workers' Day, Turn Rights into Reality*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/06/16/international-domestic-workers-day-turn-rights-reality>
- Belarminus, R. (2016, Februari 13). *Ironis, Kisah Penganiayaan PRT terus Berulang*. Retrieved from Kompas: <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/13/06300071/Ironis.Kisah.Penganiayaan.PRT.Terus.Berulang?page=all>.
- Budi, K. (2019, Juni 23). *Indonesia Dukung Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja*. Retrieved from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2019/06/23/030803526/indonesia-dukung-pengesahan-konvensi-internasional-penghapusan-kekerasan-dan?page=all>
- Conley, P. (2016). *5 Year Strategic Plan, 2016-2020*. Hong Kong: INTERNATIONAL DOMESTIC WORKERS FEDERATION. Retrieved from 5 Year Strategic Plan

- Dave, J. (2016, November). *Economic and Employment Rights: Advancing Domestic Workers' Leadership*. Retrieved from Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing : <https://www.wiego.org/sites/default/files/migrated/resources/files/DomesticWorkers-Economic%20and%20Employment%20Rights-JDave-CaseStudy-Nov2016.pdf>
- Dhewy, A. (2017). Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran Local and Migrant Domestic Workers. *Jurnal Perempuan Vol.22 No. 3*.
- DPR RI. (2016). *Tentang - Legislasi*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>
- Edj. (2010, Februari 14). "Serbet Cinta Raksasa" untuk PRT. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2010/02/14/11264826/quotserbet.cinta.raksasaquot.untuk.prt>
- Fish, J. N. (2015). Making History through Policy: A Field Report on the International Domestic Workers Movement. *International Labor and Working-Class History No. 88*, 156-165.
- Gabrillin, A. (2014, Oktober 1). *Demo di Depan DPR, PRT Bawa Replika Toilet dan Sapu*. Retrieved from Kompas: <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/01/14560401/Demo.di.Depan.DPR.PRT.Bawa.Replika.Toilet.dan.Sapu>
- Gina, A. (2017, September 2). *Yusnani: Harus ada Undang-Undang yang Menjamin Perlindungan Hak PRT*. Retrieved from Jurnal Perempuan: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/yusnani-harus-ada-undang-undang-yang-menjamin-perlindungan-hak-prt>
- Goodwin, J., & Jasper, J. M. (2003). *The Social Movements Reader: Cases and Concepts*. Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Hidayati, N. (2015). Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015 . *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No.3*, 213-217.
- HRW. (2010, Februari 12). *Indonesia: Guarantee Domestic Workers' Rights in 2010*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2010/02/12/indonesia-guarantee-domestic-workers-rights-2010>
- HRW. (2014, Agustus 28). *Letter to president-elect Joko Widodo Re: Human Rights Concerns in Indonesia*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2014/08/28/letter-president-elect-joko-widodo-re-human-rights-concerns-indonesia>
- Hukum Online. (2014, November). *Minta RUU Diselesaikan, Empat PRT Mogok Makan Di Depan DPR*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt547568474c41c/minta-ruu-diselesaikan--empat-prt-mogok-makan-di-depan-dpr/>
- IDDAILY. (2011, Februari 14). *Perjalanan panjang dan berliku RUU PRT*. Retrieved from IDDAILY: http://www.iddaily.net/2011_02_08_archive.html
- IDWF. (2014). *Introduction to ILO Convention No. 189 on decent work for domestic workers*. Retrieved from International Domestic Workers Federation: <https://idwfed.org/en/resources/introduction-to-ilo-convention-no-189-on-decent-work-for-domestic-workers>
- IDWF. (2014, Februari). *Thailand: Regional Meeting on Strengthening Regional Networking of Domestic Workers Organizations*. Retrieved from International Domestic Workers Federation: <https://idwfed.org/en/activities/thailand-regional-meeting-on-strengthening-regional-networking-of-domestic-workers->

organizations?searchterm=Regional+Meeting+on+Strengthening+Regional+Networking+of+Domestic+Workers+Organization

- IDWF. (2016, Februari 15). *Indonesia: IDWF statement on the abuse cases of domestic workers Siti Sri Marni and other 3 workers*. Retrieved from International Domestic Workers Federation: <https://idwfed.org/en/updates/indonesia-idwf-statement-on-the-abuse-cases-of-domestic-workers-siti-sri-marni-and-other-3-workers>
- IDWF. (2016, Desember). *Indonesia: National Workshop for Domestic Workers by IDWF and Jala PRT*. Retrieved from International Domestic Workers Federation: <https://idwfed.org/en/activities/indonesia-national-workshop-for-domestic-workers-by-idwf-and-jala-prt>
- IDWFED. (2014). *Indonesia: Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALAPRT)*. Retrieved from International Domestic Workers Federation: <http://idwfed.org/en/affiliates/asia-pacific/tunas-mulia-domestic-workers-union-1>
- ILO. (2006). *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf
- ILO. (2011, Juni). *Address by His Excellency Mr Susilo Bambang Yudhoyono, President of The Republic Of Indonesia*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_157823.pdf
- ILO. (2015). *Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf
- ILO. (2015, Maret). *Ringkasan Proyek PROMOTE*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359288.pdf
- ILO. (2016). *A slow road to end abuse of Indonesia's domestic workers*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_513770/lang--en/index.htm
- ILO. (2018). *Promoting Decent Work For Domestic Workers And Elimination Of Child Labor In Domestic Work: Ten Emerging Good Practices From Indonesia*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_629174.pdf
- ILO. (2019). *About the ILO*. Retrieved from International Labour Organization: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>
- ILO. (2019, Februari 18). *Countries urged to ratify labour conventions*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_672146/lang--en/index.htm
- ITUC. (2012). *DOMESTIC WORKERS - 12 + 12*. Retrieved from INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION: <https://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12>
- ITUC. (2012). *Domestic Workers News Update from Indonesia*. Retrieved from ITUC: <https://www.ituc-csi.org/3rd-update-on-domestic-workers-in>
- JALA PRT. (2017). *JALA PRT 2015-2017*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553073.pdf

- JALA PRT. (2017). *Kami Tidak Akan Diam: 31 Kisah Pekerja Rumah Tangga di Balik*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_569568.pdf
- JALA PRT. (2017, Juni). *Lembar Informasi: Kompilasi Penanganan Kasus-kasus Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*. Retrieved from International Labour Organization: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_559471.pdf
- Jayaseelan, L. V. (2011). *Statement for Indonesia's Domestic Workers Day*. Retrieved from IDDAILY: http://www.iddaily.net/2011_02_08_archive.html
- Jumiyem, & Sargini. (2019, November 13). Proses Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dengan Organisasi Internasional. (A. Pradika, Interviewer)
- Jurnal Perempuan. (2019, April 16). *Amnesty International Ajukan Sembilan Agenda HAM untuk Pemerintah Terpilih*. Retrieved from Jurnal Perempuan: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/amnesty-international-ajukan-sembilan-agenda-ham-untuk-pemerintah-terpilih>
- KBC. (2011, April 5). *Presiden SBY Digugat Pembantu Rumah Tangga*. Retrieved from Kabar Bisnis: <https://www.kabarbisnis.com/read/2819268/-presiden-sby-digugat-pembantu-rumah-tangga>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kompas. (2011, Juni 18). *RI Adopsi Konvensi ILO*. Retrieved from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2011/06/18/02285441/ri.adopsi.konvensi.ilo?page=all>
- KPA. (2015, November). *Jambore Nasional Pemimpin Perempuan*. Retrieved from Konsorium Pembaruan Agraria: http://kpa.or.id/media/baca/kegiatan/358/Jambore_Nasional_Pemimpin_Perempuan/
- KPonline. (2019, Oktober 1). *Dilantik, Obon Tabroni: Saya Alat Perjuangan Buruh*. Retrieved from Koran Perdjoengan: <https://www.koranperdjoeangan.com/dilantik-obon-tabroni-saya-alat-perjuangan-buruh/>
- LBH. (2015, Juni 16). *Menagih Tanggung Jawab Negara: Hapus Perbudakan Modern dan Penuhi Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga*. Retrieved from LBH Jakarta: <https://www.bantuanhukum.or.id/web/menagih-tanggung-jawab-negara-hapus-perbudakan-modern-dan-penuhi-hak-hak-pekerja-rumah-tangga/>
- McAdam, D., McCharty, J., & Zald, M. (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. New York: Cambridge University Press.
- Morgan, K. (2006, April 14). *Considering Political Opportunity Structure: Democratic Complicity and the Antiwar Movement*. Retrieved from Semantic Scholar: <https://pdfs.semanticscholar.org/bc3e/b62a1e7bdbb9a56594f92c3de4cec7d20510.pdf>
- MuhammedAlly, S. (2005). *Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia*. Jakarta: Human Rights Watch.
- Muryanti. (2005). Upaya Perlindungan PRT. *Jurnal Perempuan No. 39 Pekerja Rumah Tangga*, 9-15.
- Muryanti, Wahyuni, E., Kinseng, R., & Hubeis, A. (2015). Kendala Pelaksanaan Regulasi tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49*, 425-457.
- Nugroho, B. P. (2018, Oktober 20). *4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita*. Retrieved from Detik: <https://news.detik.com/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisisi-nawacita>

- Putranto, P., Utami, A. Y., & Usman, H. (2004). *Flowers on The Rock*. Jakarta: International Labour Organization.
- Putri, A. C. (2014, November 25). *Tuntut Nasib PRT, Massa Mogok Makan di Gedung DPR*. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/photo/read/2139310/tuntut-nasib-prt-massa-mogok-makan-di-gedung-dpr?page=1>
- Rahayu, N. H. (2014). Menggapai Asa Melalui Nawa Cita. *Simpul Perencana Vol. 29*, 6-25.
- Saputro, T. (2011, Desember 18). *Pekerja Rumah Tangga Tagih Janji Presiden SBY*. Retrieved from VIVA: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/273043-pekerja-rumah-tangga-tagih-janji-presiden-sby>
- SFC. (2019, Maret). *JALA PRT*. Retrieved from Sisters For Changes: <https://www.sistersforchange.org.uk/2019/03/12/jala-prt/>
- SFC, JALA PRT. (2018). *Unsafe to Work in the Home: me: Workplace exploitation and violence against women domestic workers in Indonesia*. Jakarta: Sisters For Changes.
- Shaidra, A. (2017, Juni 23). *Lita Anggraini: Menjala Pekerja Domestik Supaya Aktif Bersuara*. Retrieved from Tempo: <https://metro.tempo.co/read/887004/lita-anggraini-menjala-pekerja-domestik-supaya-aktif-bersuara>
- Soetjipto, A. (2018). *Transnasionalisme: Peran Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- SP. (2011, Oktober 28). *PRT Juga Menuntut BPJS segera Disahkan*. Retrieved from Suara Pembaruan: <https://sp.beritasatu.com/home/pertahankan-guardiola-barcelona-akan-lakukan-apapun/15200>
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. . New York: Cambridge University Press.
- Tim LBH Apik. (2002). *Kertas Posisi, Usulan Revisi Perda DKI Jakrta No 6 Tahun 1993*. Jakarta.
- Tjandraningsih, I. (2000). Gendered work and labour control: women factory workers in Indonesia. *Asian Studies Review Vol. 24, No. 2*, 257-268. Retrieved from Taylor and Francis Online.
- Topatimasang, R., Fakhri, M., & Rahardjo, T. (2000). *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Read Books.
- Tungku Menyala. (2018, Februari 15). *Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional*. Retrieved from Tungku Menyala: <https://tungkumenyala.blog/2018/02/15/hari-pekerja-rumah-tangga-nasional/>
- Tungku Menyala. (2018). *Tentang Kami - Tungku Menyala*. Retrieved from Tungku Menyala: <https://tungkumenyala.blog/tentang/>
- UN WOMEN. (2016, Mei). *IOM X Premieres New Video to Help Prevent Exploitation of Domestic Workers*. Retrieved from UN Women Asia and The Pacific: <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/05/iom-x-premieres-new-video-to-help-prevent-exploitation-of-domestic-workers>
- Wildansyah, S. (2018, Februari 15). *Tuntut UU PRT Disahkan, Massa Cuci Baju di Depan Kemenaker*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/3868636/tuntut-uu-prt-disahkan-massa-cuci-baju-di-depan-kemenaker>